



# Laporan Keuangan

## Rupbasan Kelas II Wonosari



# LAPORAN KEUANGAN

## TAHUNAN T.A 2023

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI**

Jalan Ki Ageng Giring No.10, Wonosari, Gunungkidul, DIY 55813

Telp./Fax: 0274 394185 Email: [rupbasan.wnsri@gmail.com](mailto:rupbasan.wnsri@gmail.com)

Website: <http://rupbaanwonosari.kemenkumham.go.id>

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan bayangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Wonosari, 22 Januari 2024  
KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**RIZKI ARIFIYANTO NUGRAHA**  
NIP 197212131996031001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
PernyataanTanggung Jawab .....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	5
II. Neraca .....	6
III. Laporan Operasional .....	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum .....	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	26
D. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional (LO) .....	35
E. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	41
VI. Lampiran .....	42

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA  
KELAS II WONOSARI**

Alamat : Jl. Ki Ageng Giring No.10, Wonosari, Gunungkidul, 55813  
Telp./Fax : 0274-394185 Email : Rupbasan.wnsri@gmail.com

---

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Wonosari, 22 Januari 2024

KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**RIZKI ARIFIYANTO NUGRAHA**  
NIP 197212131996031001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.591.851 atau mencapai 298 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 870.000,-. Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.756.185.659 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.760.933.000.

### B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2.737.448.542,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 27.193.320; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 2.710.255.222,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 5.616.565,- dan Rp 2.731.831.977,-.

### C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.449.840,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 1.894.484.273,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (1.893.034.433). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 1.142.011 dan sebesar Rp 0,-, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (1.891.892.422).

#### **D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.706.417.504 dikurangi Defisit-LO sebesar (1.891.892.422) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp (3.004.718), Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1.920.311.613,- dan Kenaikan/Penurunan Entitas sebesar Rp 25.414.473,-, sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 2.731.831.977,-.

#### **E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023			% thd Angg	Tahun 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di atas (di bawah)		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	870,000	2,591,851	1,721,851	298.00	1,256,512
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>870,000</b>	<b>2,591,851</b>	<b>1,721,851</b>	<b>298.00</b>	<b>1,256,512</b>
<b>BELANJA</b>						
Belanja Pegawai	B.2	1,103,763,000	1,103,749,830	-13,170	100.00	1,096,912,045
Belanja Barang	B.3	609,570,000	605,084,829	-4,485,171	99.00	612,555,551
Belanja Modal	B.4	47,600,000	47,351,000	-249,000	99.00	125,121,810
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,760,933,000</b>	<b>1,756,185,659</b>	<b>(4,747,341)</b>	<b>100.00</b>	<b>1,834,589,406</b>

## II. NERACA

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI**  
**LAPORAN NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	0	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.5	0	-
Persediaan	C.6	27,193,320	14,246,332
Persediaan yang Belum Diregister	C.7	0	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>27,193,320</b>	<b>14,246,332</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.3	1,582,384,000	1,582,384,000
Peralatan dan Mesin	C.4	1,464,714,571	1,409,048,010
Gedung dan Bangunan	C.5	930,014,000	904,928,000
Aset Tetap Lainnya	C.7	17,342,155	17,342,155
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.8	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	-1,284,199,504	-1,217,160,902
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2,710,255,222</b>	<b>2,696,541,263</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.10	-	-
Aset Lain-Lain	C.11	83,332,992	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	-83,332,992	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2,737,448,542</b>	<b>2,710,787,595</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	5,616,565	4,370,091
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.14	0	-
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.16	0	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>5,616,565</b>	<b>4,370,091</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>5,616,565</b>	<b>4,370,091</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.17	2,731,831,977	2,706,417,504
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2,731,831,977</b>	<b>2,706,417,504</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2,737,448,542</b>	<b>2,710,787,595</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*ss(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,449,840	1,256,512
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,449,840</b>	<b>1,256,512</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	1,102,999,453	1,097,662,422
Beban Persediaan	D.3	55,026,324	77,195,432
Beban Barang dan Jasa	D.4	353,119,983	348,565,919
Beban Pemeliharaan	D.5	175,585,250	141,547,070
Beban Perjalanan Dinas	D.6	54,213,347	73,568,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	153,539,916	168,753,247
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1,894,484,273</b>	<b>1,907,292,090</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(1,893,034,433)</b>	<b>(1,906,035,578)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	1,142,011	(903,820)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	1,142,011	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	-	903,820
<b>SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL</b>		<b>1,142,011</b>	<b>(903,820)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(1,891,892,422)</b>	<b>(1,906,939,398)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.10	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>		<b>(1,891,892,422)</b>	<b>(1,906,939,398)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	2,706,417,504	2,740,166,921
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-1,891,892,422	-1,906,939,396
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTASI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	<b>(3,004,718)</b>	<b>(257,750)</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7	(3,004,718)	(25,775)
Lain - Lain	E.8	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	1,920,311,613	1,873,447,731
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.11	<b>25,414,473</b>	<b>(33,749,417)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.12</b>	<b>2,731,831,977</b>	<b>2,706,417,504</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

*Dasar  
Hukum*

#### A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

#### A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari adalah tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Entitas berkedudukan di Jl. Ki Ageng Giring No.10 Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Melalui peran rumah penyimpanan benda sitaan negara diharapkan hak asasi manusia dalam bidang perlindungan atas benda sitaan yang diperlukan dalam proses peradilan dapat dijaga dengan baik.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Rupbasan Kelas II Wonosari mempunyai visi: *“Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Professional dalam Penegakkan Hukum dan Perindungan Hak Asasi Manusia.”* Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap kepemilikan hak tersangka/ terdakwa/ terpidana berupa barang bukti sitaan dan rampasan negara.
2. Terlindungi dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban kantor Rupbasan Wonosari.

*Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari*



### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan Ham adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perkataan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 98 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai Kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2023. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambahan ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dan entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan  
Aset Tetap

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang Adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan. Ganti rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca

per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan  
Rp.2.591.851,-

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.591.851,- atau mencapai 298 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 870.000. Rincian Pendapatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari sebagai berikut. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122)	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	870,000	2,591,851	298.00
<b>Jumlah</b>	<b>870,000</b>	<b>2,591,851</b>	<b>256.00</b>

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 106,27 persen dibandingkan 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena adanya perubahan tarif sewa rumah dinas.

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122)	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	2,591,851	1,256,512	106.27
Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2,591,851</b>	<b>1,256,512</b>	<b>106.27</b>

**Realisasi Belanja B.2. Belanja**

Negara

Rp.1.756.185.659

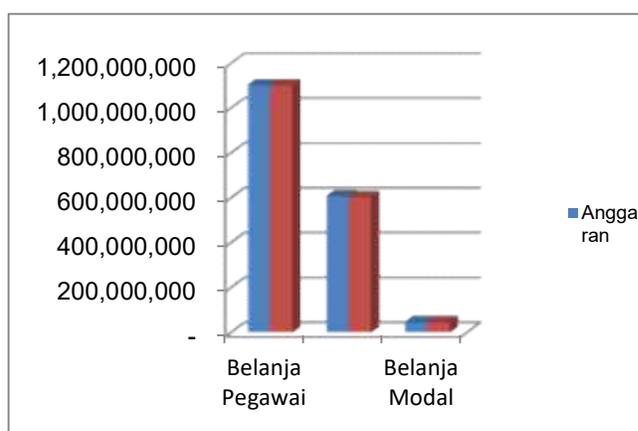
,-

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.756.185.659 atau 100 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 1.760.933.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023*

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1,103,763,000	1,103,749,830	100.00
Belanja Barang	609,570,000	605,084,829	99.00
Belanja Modal	47,600,000	47,351,000	99.00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>1,760,933,000</b>	<b>1,756,185,659</b>	<b>100.00</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,760,933,000</b>	<b>1,756,185,659</b>	<b>100.00</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,103,749,830	1,096,912,045	0.62
Belanja Barang	605,084,829	612,555,551	(1.22)
Belanja Modal	47,351,000	125,121,810	(62.16)
<b>Jumlah</b>	<b>1,756,185,659</b>	<b>1,834,589,406</b>	<b>(4.27)</b>

Dibandingkan dengan 31 Desember 2022 realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 4,27 persen dikarenakan adanya penurunan realisasi belanja barang dan belanja modal.

- a. Pada belanja pegawai naik sebesar 0,62 persen karena adanya kenaikan pangkat pegawai;
- b. Pada belanja barang mengalami penurunan sebesar 1,22 persen dikarenakan adanya penurunan anggaran untuk belanja barang;
- c. Anggaran dari pusat untuk belanja modal dibatasi.

Belanja Pegawai  
Rp.1.103.749.830,

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.103.749.830 dan Rp 1.096.912.045. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,62% dibandingkan 30 Desember 2022 dikarenakan adanya kenaikan Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada Tahun 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,099,103,830	1,090,399,045	0.80
Belanja Lembur	4,646,000	6,513,000	(28.67)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1,103,749,830</b>	<b>1,096,912,045</b>	<b>0.62</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,103,749,830</b>	<b>1,096,912,045</b>	<b>0.62</b>

Belanja Barang  
Rp.605.084.829,-

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 605.084.829,- dan Rp.612.555.551,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 1.22 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dikarenakan adanya penurunan Anggaran Belanja Tahun 2023 untuk belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	137,180,008	137,689,665	(0.37)
Belanja Barang Non Operasional	169,825,518	175,515,350	(3.24)
Belanja Jasa	44,117,606	33,815,704	30.46
Belanja Pemeliharaan	168,641,850	137,231,870	22.89
Belanja Perjalanan Dinas	54,213,347	73,568,000	(26.31)
Belanja Persediaan	31,106,500	54,734,962	(43.17)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>605,084,829</b>	<b>612,555,551</b>	<b>(1.22)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>605,084,829</b>	<b>612,555,551</b>	<b>(1.22)</b>

Belanja Modal  
Rp 47.351.000

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 47.351.000,- dan Rp.125.121.810,-

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,351,000	125,121,810	37.84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>47,351,000</b>	<b>125,121,810</b>	<b>37.84</b>
Pengembalian Belanja	0		-
<b>Jumlah</b>	<b>47,351,000</b>	<b>125,121,810</b>	<b>37.84</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp 47.351.000 berupa 1 televisi dan 1 unit Laptop. Pengadaan peralatan dan mesin ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp.0,-*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp.0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp 0,-*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp.0,- dan Rp.0,-

*Piutang PNB  
Rp 0,-*

### C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB tersebut berupa potongan sewa rumah dinas yang telah dipotong melalui SPM Gaji Induk.

*Bagian Lancar  
TP/TGR Rp0*

### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

*Bagian Lancar TPA  
Rp0*

#### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar Rp0*

#### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan piutang takterttagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di  
Muka Rp0*

#### **C.8 Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0*

#### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

*Persediaan  
Rp.27.193.320,-*

#### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.27.193.320,- dan Rp.14.246.332,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	26,789,120	13,877,432
Barang untuk Pemeliharaan	404,200	368,900
Persediaan bahan baku	0	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>27,193,320</b>	<b>14,246,332</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp0

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp0

**C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang Rp0

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah  
Rp.1.582.384.000

**C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.582.384.000 dan Rp.1.582.384.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>1,582,384,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Transfer Masuk	Rp	-
Selisih Revaluasi Aset	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
<b>Mutasi kurang:</b>		
Penghapusan	Rp	-
Re Revaluasi Aset Tahun 2022	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1,582,384,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1,582,384,000</b>

Tanah seluas 994 m2 yang terletak di Jl Ki Ageng Giring No.10 Wonosari Gunungkidul DIY tersebut terdiri dari 1 (satu) unit bangunan Kantor Rupbasan Wonosari serta 1 (satu) unit rumah dinas Kepala.

*Peralatan dan Mesin*  
Rp.1.464.714.571,-

#### C.15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 1.464.714.571 dan Rp. 1.409.048.010. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>1,409,048,010</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>145,172,593</b>
Pembelian	22,265,000
Transfer Masuk	122,907,593
Hibah barang	0
Reklasifikasi Masuk	0
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>89,506,032</b>
Transfer Keluar	5,600,000
Penghentian BMN dari Penggunaan	83,332,992
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi pencatatan nilai berkurang	573,040
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1,464,714,571</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	<b>-1,100,546,256</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>364,168,315</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp.930.014.000

### C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.930.014.000 dan Rp.904.928.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>904,928,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>25,086,000</b>
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	25,086,000
Koreksi Kesalahan Input IP (Revaluasi Aset )	-
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>-</b>
Koreksi Kesalahan Input IP (Revaluasi Aset )	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>930,014,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(110,446,648)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>819,567,352</b>

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0

### C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Aset Tetap Lainnya  
Rp.17.342.155

### C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.17.342.155 dan Rp.17.342.155. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan (monnografi). Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>17,342,155</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>17,342,155</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>17,342,155</b>

Konstruksi dalam  
Pengerjaan Rp0

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp.(1.284.199.504)

### C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. (1.284.199.504) dan Rp.(1.217.160.902). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,390,892,467	(1,162,999,830)	2,553,892,297
2	Gedung dan Bangunan	930,014,000	(121,199,674)	1,051,213,674
3	Aset Tetap Lainnya	17,342,155	0	17,342,155
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>2,338,248,622</b>	<b>(1,284,199,504)</b>	<b>3,622,448,126</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp0

### C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-lain  
Rp.83.332.992,-

### C.22. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.83.332.992,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>83,332,992</b>
- Transfer Masuk	-
- Penghentian BMN dari penggunaan	83,332,992
<b>Mutasi kurang:</b>	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>83,332,992</b>
Akumulasi Penyusutan	(83,332,992)
<b>Nilai buku per 31 Desember 2023</b>	-

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp.(83.332.992),-*

### **C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.(83.332.992),- dan Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari KPPN  
Rp.0,-*

### **C.24. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp.5.616.565,-*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.5.616.565,- dan Rp.4.370.091,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga tersebut merupakan belanja yang masih harus dibayarkan namun pada pelaporan 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran yaitu berupa beban langganan telepon, listrik dan internet yang dibayarkan di bulan Januari 2024.

*Utang belum  
ditagihkan Rp. 0,-*

#### **C.26 Utang yang belum ditagihkan**

Nilai utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- utang yang belum ditagihkan merupakan kuitansi UP yang sudah diinput pada aplikasi bendahara namun belum dipertanggungjawabkan ke KPPN karena masih menunggu nilai batas minimal pengajuan Revolving.

*Pendapatan yang  
ditangguhkan Rp0*

#### **C.27 Pendapatan Yang Ditangguhkan**

Nilai Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan Negara yang belum disetor ke kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, Pengembalian belanja serta pungutan / potongan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2023.

*Pendapatan Diterima  
di Muka Rp0*

#### **C.28 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

*Beban yang Masih  
harus Dibayar Rp.0,-*

#### **C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas  
Rp.2.731.831.977,-*

#### **C.30 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.731.831.977,- dan Rp. 2.706.417.504. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Pendapatan

PNBP

Rp.1.449.840,-

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.449.840,- dan Rp.1.256.512,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Perbandingan Rincian Pendapatan LO TA 2023 dan 2022*

AKUN	URAIAN	31-12-2023	31-12-2022
<b>PENDAPATAN PNBP LAINNYA</b>			
425131	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	1,449,840	1,256,512
<b>Jumlah</b>		<b>1,449,840</b>	<b>1,256,512</b>

Pendapatan LO Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonosari berasal dari PNBP lainnya berupa Pendapatan dari pemanfaatan BMN yaitu Sewa Rumah Dinas Kepala Rupbasan Wonosari.

Beban Pegawai

Rp.1.102.999.453,-

**D.2. Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.102.999.453 dan Rp. 1.097.662.422. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	759,943,700	744,867,800	2.02
Beban Pembulatan Gaji PNS	13,895	13,518	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	(148)	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	186,655,858	185,166,252	0.80
Beban Uang Makan	151,740,000	161,495,000	(6.04)
Beban Lembur	4,646,000	6,513,000	(28.67)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	(393,000)	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>1,102,999,453</b>	<b>1,097,662,422</b>	<b>0.49</b>

**Beban  
Persediaan**  
Rp.55.026.324,-

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.55.026.324,- dan Rp.77.195.432,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan turun dikarenakan adanya persediaan penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2022. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	55,026,324	77,195,432	(28.72)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>55,026,324</b>	<b>77,195,432</b>	<b>(28.72)</b>

**Beban Barang  
dan Jasa**  
Rp.353.119.983,-

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.353.119.983 dan Rp.348.565.919. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan /atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	69,703,008	85,477,765	(18.45)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13,870,000	10,950,000	26.67
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,007,000	1,566,000	28.16
Beban Honor Operasional Satker	51,600,000	49,200,000	4.88
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	-
Beban Barang Operasional - Penanganan COVID - 19	0	0	-
Beban Bahan	34,911,320	30,161,800	15.75
Beban Honor Output Kegiatan	900,000	0	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	112,636,698	118,788,550	(5.18)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	7,565,000	-
Beban Daya dan Jasa	42,464,457	31,657,804	34.14
Beban Sewa	0	1,000,000	-
Beban Jasa Profesi	3,650,000	2,600,000	-
Beban aset peralatan dan mesin-ekstrakomtabel	21,377,500	9,500,000	0.00
Beban Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	0	100,000	-
<b>Jumlah</b>	<b>353,119,983</b>	<b>348,566,919</b>	<b>1.31</b>

**Beban Pemeliharaan**  
Rp.175.585.250,-

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.175.585.250,- dan Rp.141.547.070,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-12-2023	,31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56,806,900	32,878,700	72.78
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107,036,650	101,102,170	5.87
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,741,700	7,566,200	55.19
<b>Jumlah</b>	<b>175,585,250</b>	<b>141,547,070</b>	<b>24.05</b>

**Beban Perjalanan Dinas**  
Rp.54.213.347,-

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.54.213.347,- dan Rp.73.568.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	33,813,347	54,818,000	-38.32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,400,000	18,750,000	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>54,213,347</b>	<b>73,568,000</b>	<b>(26.31)</b>

**Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
Rp0

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.153.539.916,-

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.153.539.916,- dan Rp.168.753.247,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	132,033,865	146,849,429	(10.09)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,506,051	20,917,627	2.81
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Poperasional Pemerintah	-	1,018,410	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>153,539,916</b>	<b>168,785,466</b>	<b>(7.28)</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp.1.142.011,-

#### D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp.1.142.011,- dan Rp.(903.820,-). Terdapat

pendapatan dari penjualan 1 paket Peralatan dan Mesin berupa Handy Talky, PC, Laptop, Printer, Kipas Angin, Kursi Besi, Jam Dinding, UPS, Kompor gas, Televisi, Tustel, Scanner.

*Pos Luar Biasa*  
*Rp0*

#### **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### *Ekuitas Awal*

*Rp.2.706.417.504*

*,-*

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.706.417.605,- dan Rp. 2.740.166.921,-.

### *Defisit LO*

*Rp.(1.891.892.42*

*2)*

### **E.2. Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (1.891.892.422) dan Rp. (1.906.939.398). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Penyesuaian*

*Nilai Aset 0*

### **E.3. Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

### *Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp.0,-*

### **E.4 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per **31 Desember** 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

### *Koreksi Nilai Aset*

*Tetap Rp.0*

### **E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Selisih revaluasi aset tetap tersebut berasal dari penilaian ulang tanah serta gedung dan bangunan.

### *Koreksi Atas*

*Beban*

*Rp.(3.004.718)*

### **E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(3.004.718) dan Rp.(257.750). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap yang bukan revaluasi nilai.

Berupa kesalahan pendetailan aset tetap pada modul aset tetap aplikasi SAKTI yang menimbulkan penambahan NUP baru pada gedung dan bangunan kantor permanen yang seharusnya hanya penambahan nilai bangunan gedung permanen NUP 1 senilai Rp. 2.431.678,- dan koreksi susulan berkurang atas laptop sebagai tindak lanjut temuan BPK senilai Rp (573.000).

Koreksi Lain -  
Lain Rp0

### E.7. Koreksi Lain -Lain

Koreksi lain –lain untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain Koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp.1.920.311.613  
,-

### E.8. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.920.311.613 dan Rp. 1.873.447.731.

Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas lain	1,756,185,659
Diterima dari ke Entitas lain	(2,591,851)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	166,717,805
Pengesahan Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>1,920,311,613</b>

DDEL  
Rp.(2.591.851)  
DKEL  
Rp.1.756.185.659

### E.9. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain/ ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 DDEL sebesar minus Rp.(2.591.851) sedangkan DKEL sebesar Rp.1.756.185.659.

Transfer Masuk  
Rp.0,-  
Transfer Keluar  
Rp.0,-

### E.10. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer masuk / transfer keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA BUN. Transfer masuk sampai dengan 31 Desember 2023 Rp.0,- dan transfer keluar Rp.0,-.

*Pengesahan  
Hibah Langsung  
Rp.0,-*

### **E.11. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Rp.0,-.

*Ekuitas Akhir  
Rp.2.731.831.977*

### **E.12. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.731.831.977 dan Rp. 2.706.417.504.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada

**F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Sampai dengan bulan Desember 2023 dilakukan 7 (tujuh) kali revisi anggaran sebagai berikut :

Revisi	51	52	53	TOTAL	Keterangan
Revisi ke-1 14-02-2023	900,718,000	609,570,000	47,600,000	1,557,888,000	Pemutakhiran Halaman III DIPA dan POK
Revisi ke-2 11-02-2022	900,718,000	609,570,000	47,600,000	1,557,888,000	Pemutakhiran Hal III DIPA
Revisi ke-3 21-06-2023	1,103,763,000	609,570,000	47,600,000	1,760,933,000	Revisi Gaji antar satker
Revisi ke-4 07-07-2023	1,103,763,000	609,570,000	47,600,000	1,760,933,000	Revisi Hslsmn III DIPA
Revisi ke-5 20-09-2023	1,103,763,000	609,570,000	47,600,000	1,760,933,000	Pemutakhiran POK
Revisi ke-6 12-10-2023	1,103,763,000	609,570,000	47,600,000	1,760,933,000	Revisi Halaman III DIPA dan antar program untuk pemenuhan belanja operasional
Revisi ke-7 21-12-2023	1,103,763,000	609,570,000	47,600,000	1760933000	Revisi POK



Wonosari, 22 Januari 2024  
Rupbasan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**RIZKI ARIFIYANTO NUGRAHA**  
NIP.197212131996031001